

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan suatu permukaan bumi yang terletak di daratan yang mana terdapat berbagai macam isi di dalamnya dan berbagai benda dan tumbuhan yang tumbuh dipermukaan tanah tersebut. Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan tanah merupakan suatu kebutuhan yang primer bagi kehidupan manusia saat ini. Tanah adalah sesuatu yang menjadi tempat atau ruang terhadap segala kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan manusia.¹

Pasal 33 ayat 3 Undang – undang Dasar 1945 yang merupakan landasan ideal hukum agraria nasional menetapkan “Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keanekaragaman suku, budaya, ras dan agama, dimana Indonesia juga sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berjumlah terdiri dari 17.504 pulau.² dengan jumlah pulau yang fantastis memiliki berbagai kandungan dan sumber daya alam yang dapat di manfaatkan oleh negara untuk ke makmuran masyarakat Indonesia, sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat 3 Undang – undang Dasar 1945 yang merupakan

¹ Jayadi Setiabudi, 2015. *Pedoman pengurusan surat tanah dan rumah beserta perizinannya*. Yogyakarta. Penerbit Buku Pinter. Hal.19

² Lesu Usai. *10 Negara kepulauan terbesar di dunia*. <http://www.libgar.com>. 3 Desember 2017

landasan ideal hukum agraria nasional menetapkan “Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.pulau yang begitu banyak dimiliki oleh Indonesia, belum semua pulau telah memiliki penghuninya, dari beberapa pulau yang telah berpenghuni di Indonesia telah terdapat masyarakat yang berkembang biak di pulau tersebut yang dimana di setiap pulau satu dengan satunya memiliki anekaragam suku dan budaya dalam perkumpulan masing-masing yang biasa disebut masyarakat hukum adat.

Penduduk yang berada disuatu wilayah geografis wilayah Indonesia biasa disebut dengan masyarakat hukum adat dimana masyarakat tersebutlah yang menduduki suatu wilayah di Indonesia tersebut sebelum Indonesia merdeka, seperti yang disampaikan oleh Taqwadin Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turuntemurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup. Masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun memiliki sistem nilai-nilai yang hidup di lingkungannya, ideologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas”. Masyarakat ini masih memegang nilai-nilai tradisi dalam sistem kehidupannya.³ Sebagaimana juga yang terdapat dalam kutipan buku Fifik Wiryan yang mengutip pendapat dari B. Ter Haar Bzn yang memberikan istilah masyarakat adat dengan persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) yaitu “lingkungan-

³ Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36.

lingkungan teratur yang bersifat kekal, yang mempunyai kekuasaan sendiri dan kekuasaan sendiri baik berupa kejasmanian maupun kerohanian”.⁴

Dalam menyikapi masyarakat hukum Adat, Indonesia adalah negara yang mengakui keberadaan masyarakat adatnya Sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercantum dalam pasal 18 B yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Dari pernyataan pengakuan pemerintahan negara terhadap masyarakat hukum Adat maka masyarakat hukum adat dapat berekspresi dalam menjalankan sistem kehidupannya sendiri dengan dibatasi aturan-aturan yang menjaga keseimbangan antar sesama masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia.

Salah satu hak yang diakui atau dilindungi oleh negara untuk masyarakat hukum adat yaitu penguasaan tanah adat atau tanah ulayat, tanah ulayat diakui sepanjang masyarakat yang hidup didaerah tanah tersebut masih memegang erat kebudayaan adat dari leluhur dan masyarakat adat beserta kekuasaannya masih ada didaerah itu untuk memegang tanah adat, sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Pokok Agraria yang tercantum dalam pasal 3 yang berbunyi :⁵

⁴ Fifik Wiryani, Reformasi Hak Ulayat, 2009, Malang : Setara Press Malang

⁵ Undang-Undang Dasar Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960

”Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Kriteria bagi adanya hak ulayat di suatu masyarakat hukum Adat tertentu tidak ada penjelasannya dalam UUPA maupun dalam penjelasannya, kiranya masih adanya hak ulayat diketahui dari kenyataan mengenai :⁶

1. Masih adanya suatu kelompok orang-orang yang merupakan warga suatu masyarakat hukum Adat tertentu.
2. Masih adanya tanah yang merupakan wilayah masyarakat hukum Adat tersebut, yang disadari sebagai kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum Adat itu sebagai “lebensraum-nya”.
3. Selain itu eksistensi hak ulayat masyarakat hukum Adat yang bersangkutan juga diketahui dari kenyataan, masih adanya kepala Adat dan para tetua Adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warganya, melakukan kegiatan sehari-hari, sebagai pengemban tugas kewenangan masyarakat hukum Adatnya, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah bersama tersebut.

Maka melalui Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 yang terdapat didalam pasal 3 ini masyarakat hukum adat memiliki hak yang sah dalam mengurus tanah ulayat di daerah masyarakat hukum adat itu sendiri, Oleh sebab itu Negara perlu mengelola kemajuan masyarakat agar menjadi potensi dalam pembangunan, bukan menjadi penyebab konflik.

⁶ Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta. Djambatan. Hal.192

Dalam hukum adat istilah hak ulayat adalah kewenangan atas suatu wilayah, yang menurut hukum adat bahwa wilayah tersebut dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya dari asal muasal atau turun-temurun, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya, sebagaimana yang disampaikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33.

Fakta tentang terjadinya konflik disebabkan oleh kurang profesionalnya pemerintah dalam menata norma hukum sehingga menyebabkan terjadinya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam di beberapa kawasan di Indonesia.⁷ Selain konflik normative antara hukum adat dengan hukum Negara, seringkali juga mengenai penguasaan tanah, pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia, ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelompok, kegiatan ekonomi masyarakat dan kepadatan penduduk. Oleh sebab itu hendaknya pemerintah merespon dan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum local ke dalam tatanan hukum nasional, sebagaimana dimaksud oleh Philips Nonnet dan Selznick, dengan merespon prinsip-prinsip hukum adat yang diformulasikan dan dikemas dalam hukum nasional. Dalam pengurusan sistem tanah adat oleh masyarakat hukum adat di Indonesia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, berbeda adatnya maka akan beda juga sistem kepengurusan tanah adat di setiap daerah tanah adat tersebut. Maka

⁷ Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, kini dan Masa Mendatang)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm. vii.

pemerintah seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat yang masih memegang erat prinsip-prinsip leluhur dalam mengurus tanah adat mereka.

Beragamnya cara sistem kepemilikan dan kemanfaatan tanah adat disetiap daerah mengakibatkan suatu keunikan dari setiap masyarakat hukum adat dalam melakukan pengurusan tanah adat milik mereka, didalam suatu kelompok masyarakat adat pasti memiliki kepala adat atau biasa disebut dengan petinggi adat (kepala suku), kepala adat inilah yang berperan penting dalam melakukan suatu kepengurusan tanah adat, kepala adat menurut Menurut Soepomo, pengertian Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan, maka peran dan fungsi Kepala Adat berdasarkan pengertian diatas adalah bertugas memelihara hidup rukun di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya, Aktivitas Kepala Adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan kehidupan masyarakat. Tidak ada satupun lapangan pergaulan hidup didalam persekutuan yang tertutup bagi Kepala Adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin untuk menegakan hukum.⁸ Maka dari peran kepala adat ini dalam menghadapi permasalahan yang kompleks salah satunya permasalahan tanah sekiranya dapat memberikan keseimbangan yang diharapkan oleh masyarakatnya.

⁸Kristoper. 2016. *Peran Kepala Adat (pemimpin informal) dalam penyelesaian masalah sosial*. eJournal Pemerintah Integratif. Krayan

Suatu ketertarikan dalam membahas tanah adat atau tanah ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia, bahwasanya kita ketehau bahwa masyarakat hukum adat dalam mengurus kehidupannya berbeda-beda, salah satunya masyarakat hukum adat suku Dayak di Kalimantan Timur, masyarakat suku Dayak satu dengan yang lainnya memiliki beberapa perbedaan yaitu salah satunya dari segi bahasa dan juga pimpinan seorang kepala Adat dalam mengurus masyarakatnya.

Salah satu penelitian tentang sistem kepemilikan dan kemanfaatan tanah adat atau tanah ulayat di Kabupaten Kutai barat yang begitu masih banyaknya masyarakat hukum adat yang tinggal didaerah pedalaman wilayah Kalimantan Timur. Berlandaskan latar belakang yang ditulis oleh penulis, maka penulis memiliki ketertarikan dalam membahas tentang “HUKUM TANAH ADAT DI DESA JUAQ ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah di uraikan, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan menjadi dasar pembahasan penelitian, yaitu :

1. Apa sajakah macam-macam tanah adat yang ada di desa Juaq Asa ?
2. Apa sajakah asas-asas hukum tanah adat didesa Juaq Asa ?
3. Bagaimana persyaratan kepemilikan tanah adat di Desa Juaq Asa ?

4. Bagaimana persyaratan pemanfaatan tanah adat oleh masyarakat Desa Juaq Asa dan masyarakat desa luar Juaq Asa ?
5. Bagaimana hak dan kewajiban masyarakat adat dan masyarakat luar desa terhadap tanah adat Desa Juaq Asa ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian merupakan suatu pencapaian akhir dari apa yang diharapkan oleh penulis dalam memaparkan hasil penelitiannya, maka dengan ini penulis memaparkan beberapa tujuan dari penulisan ilmiah ini, yaitu sebagai berikut :

1. Berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat hukum adat yang masih eksis hingga saat ini dalam mengelola tanah adat masyarakat hukum adat di Desa Juaq Asa.
2. Memberikan gambaran besar tentang tanah adat yang ada di dalam lingkungan masyarakat hukum adat Desa Juaq Asa.
3. Memberikan gambaran besar tentang pemanfaatan tanah adat di desa Juaq Asa.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari adanya penelitian ini yaitu di harapkan :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat wawasan ilmu pengetahuan kepada seluruh para pembaca atau teoritis yang mengembangkan ilmu pengetahuan tentang tanah adat ini.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran kejadian yang langsung ada dilapangan dan menumbuhkan rasa kesadaran kepada seluruh pembaca dan juga termasuk pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dalam mengurus rumah tangganya seperti permasalahan tanah adat (hak ulayat).

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan pemerintah sebagai instansi negara yang melindungi segenap bangsa dan warganya, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih ketat terhadap hak-hak tanah adat oleh masyarakat hukum adat, dan dalam pembahasan tentang tanah adat ini menjadi suatu refrensi untuk dilakukan penelitian lebih mendalam lagi terkait pengawasan dan perlindungan bagi pemerintah terhadap tanah adat bagi masyarakat hukum adat.

Adapun dari kegunaan penelitian ini ditujukan untuk kepentingan bersama yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini secara objektif memberikan dan meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkait keseluruhan permasalahan terkait keseluruhan permasalahan mengenai Tanah Adat yang khususnya tentang permasalahan sistem kepemilikan dan kegunaan tanah adat tersebut yang bersinggungan langsung dengan hukum Agraria dan hukum adat yang termasuk dari hukum perdata. Di samping itu manfaat penelitian secara subyektif yaitu sebagai syarat untuk penulisan Tugas

Akhir dan menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai keseluruhan permasalahan mengenai tanah adat yang khususnya tentang permasalahan sistem kepemilikan dan kegunaan tanah adat tersebut yang bersinggungan langsung dengan hukum Agraria dan hukum adat yang keseluruhannya bersumber pada Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur, pegangan maupun pengetahuan bagi masyarakat tentang sistem kepemilikan dan kegunaan tanah ulayat / tanah adat.

F. Metode Penelitian

Metode adalah merupakan suatu cara seseorang ilmuan untuk mendapatkan suatu hal yang baru dengan berbagai cara yang dilakukan salah satunya metode identifikasi hukum, dalam penulisan ilmiah ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis melakukan metode pendekatan ini dengan maksud agar pembahasan penelitian yang dicari penulis bisa terpenuhi. Berdasarkan pengertiannya metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan memperhatikan fenomena hukum yang ada atau terjadi di suatu masyarakat secara langsung.

Penulis juga menggunakan metode identifikasi, metode identifikasi menurut Koenjtaraningrat, merupakan metode berbentuk pengenalan terhadap suatu ciri-ciri fenomena sosial secara jelas dan terperinci (Koenjtaraningrat, 1987: 17). Dalam menganalisa dan mencari data yang diinginkan pendekatan yang dilakukan adalah dengan melihat fenomena hukum adat yang ada di masyarakat kita harus turun langsung ke masyarakat untuk merasakan apa yang terjadi sebenarnya.

Penulis menitik beratkan pada aspek hukum yang ada di masyarakat hukum adat salah satunya hak Ulayat dan secara langsung melihat fenomena hukum yang ada di masyarakat hukum adat desa Juaq Asa, penelitian dengan metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang nyata terhadap hak ulayat oleh masyarakat hukum Adat Dayak di Desa Juaq Asa kecamatan Barong Tongkok kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur tentang bagaimana kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat di Desa tersebut, dengan beberapa cara yaitu seperti wawancara dengan kepala Adat Desa tersebut, dll.

2. Lokasi penelitian

lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Desa Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, alasan penulis mengambil lokasi penelitian di desa ini adalah karena masyarakat adatnya yang begitu masih kental dan salah satu daerah yang memiliki tanah Adat yang di kuasai oleh masyarakat Adat dan telah disahkan oleh kementrian lingkungan hidup dan kehutanan terkait tanah adat yang dikuasai dengan nomor : SK. 4618/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2017 tanggal 5 september 2017.

3. Sumber data penelitian

Data yang digunakan untuk merancang penulisan ilmiah ini, penulis melakukan beberapa pengumpulan data, yaitu :

a. Data Primer

Adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama/pertama, yaitu berupa :

1) Hasil Interview/Wawancara

Dalam penelitian ini untuk melakukan pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara kepada narasumber yang diinginkan untuk memberikan informasi, pendapat, dan lain-lain terhadap tanah adat yang ada di Desa Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, terutamanya yaitu kepada kepala Adat di Desa tersebut karena yang berperan penting dalam

memberikan wewenang masyarakat adatnya dalam menguasai tanah adat tersebut adalah Kepala Adat Di desa tersebut yang memimpin masyarakat Adatnya.

2) Observasi

Observasi adalah data yang dikumpulkan melalui turun lapang secara langsung kemasyarakat hukum adat dengan merasakan fenomena-fenomena hukum tentang tanah adat yang ada di masyarakat hukum adat desa Juaq Asa.

3) Dokumen

Dokumen adalah jenis data yang didapat dari lembaga-lembaga yang berada di desa Juaq Asa tersebut apabila memang terdapat aturan tertulis dari lembaga desa tersebut. Pengumpulan data ini yaitu dengan cara mengambil fotokopi dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian penulis dan sebagai pendukung data dari penulisan penelitian penulis.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang mendukung, menjelaskan serta memberikan tafsiran terhadap sumber data primer. Dalam hal ini yakni data yang dikumpulkan dari Peraturan Perundang-Undangan, buku maupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis angkat serta dapat digunakan sebagai pelengkap data primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan penulisan hukum ini ialah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

- 2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria
- 3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- 4) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah jenis data mengenai pengertian baku yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam melengkapi data Primer dan Sekunder, adapun beberapa jenis bahan dari data tersier adalah sebagai berikut :

- 1) Ensiklopedia
- 2) Kamus

G. Teknik pengumpulan data-data

Teknik pengumpulan data-data adalah proses melaksanakan pengumpulan data-data, dimana ditentukan beberapa teknik untuk mengumpulkan data agar bisa melengkapi dari hasil pembahasan penelitian, beberapa teknik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data secara berbicara dan melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian salah satunya kepala adat didesa tersebut.

2. Observasi

Obeservasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara ikut secara langsung atau turun lapang secara langsung kemasyarakat hukum adat dengan merasakan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat hukum adat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan ketika di desa tersebut telah merumuskan suatu peraturan adat kedalam bentuk tulisan, maka akan diambil fotokopi dari berkas asli dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian penulis.

H. Rencana sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini terdiri dari 4 bab dengan pembahasan permasalahan yang berurutan, adapun garis besarnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori hukum sebagai dasar dari pembahasan penelitian diangkat untuk di teliti diangkat dari rumusan masalah maka tinjauan pustaka ini memberikan gambaran dasar tentang penelitian yang penulis angkat untuk memperkuat data yang didapat, agar nantinya data yang didapat dapat diselerasikan dengan tinjauan pustaka yang berkaitan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan penjabaran atau penyajian data-data yang didapat selama penelitian yang diangkat berdasarkan rumusan masalah yang ingin dibahas untuk memberikan hasil inti dari penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan berisi saran tentang yang diteliti oleh penulis

